



Batasi Mobilitas 70 Persen Warga

■ Epidemiolog Jelaskan

Cara Kendalikan Penularan Covid-19



Riris Andono A.
Epidemiolog UGM

... karena peningkatan penularan itu kaitannya dengan mobilitas yang tinggi. Satu cara mengendalikan penularan, ya, menghentikan mobilitas.

YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengundang perwakilan RS rujukan Covid-19 serta epidemiolog untuk membahas lonjakan kasus Covid-19 di DIY, akhir-akhir ini. Rapat berlangsung di Kompleks Kepatihan pada Senin (21/6).

Ditemui usai pertemuan, Epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad menyatakan, guna mengendalikan penularan Covid-19, Pemda DIY harus mampu melakukan pembatasan mobilitas terhadap 70 persen populasi penduduknya. Langkah itu dinilai efektif untuk menangani pandemi Covid-19 di suatu wilayah.

Contoh konkretnya bisa berkaca pada Selandia Baru dan Vietnam yang dinilai berhasil mengatasi virus corona di negaranya masing-masing. Kedua negara tersebut mampu mengendalikan minimal 70 persen warganya untuk berdiam diri di da-

lam rumah dalam jangka waktu tertentu.

"Dari kami sudah cukup jelas, karena peningkatan penularan itu kaitannya dengan mobilitas yang tinggi. Satu cara mengendalikan penularan, ya, menghentikan mobilitas," jelas Riris, Senin (21/6).

Jika mobilitas dapat dikendalikan, otomatis jumlah penambahan kasus dapat ditekan. Karena virus akan kesulitan mencari inangnya. Pandemi pun dapat segera tertangani. Upaya pengendalian mobilitas tersebut sebenarnya serupa dengan konsep kekebalan kelompok atau *herd immunity* dalam vaksinasi.

Kekebalan kelompok merupakan suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi. Karena banyak penduduk

● ke halaman 11

	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
.....	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
.....	☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
.....	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Batasi Mobilitas

● Sambungan Hal 1

yang tervaksin, virus menjadi sulit untuk menular.

Lebih jauh, Riris mengungkapkan, agar kebijakan pembatasan berjalan efektif tentu membutuhkan dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dia membandingkan masa awal pandemi Covid-19 melanda pada 2020 dengan saat ini. Dulu sebagian besar masyarakat rela untuk tinggal menetap di rumah. Namun saat ini, meski PPKM mikro diberlakukan, mobilitas masyarakat masih tergolong tinggi.

Kegiatan masyarakat pun marak digelar tanpa adanya pembatasan peserta. "Kalau 70 persen masyarakat mau di rumah saja selama paling tidak 20 hari, kasus akan menurun," terangnya. "Apa pun istilahnya, yang penting menurunkan mobilitas. Bagaimana masyarakat agar tidak melakukan mobilitas," tambahnya.

Agar pembatasan mobilitas berjalan efektif, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pertama ma-

syarakat perlu menghindari kegiatan yang melibatkan kerumunan. "Hindari kerumunan, bahkan di beberapa wilayah itu ada yang mengatur maksimal kerumunan itu tiga orang," tandasnya.

Kemudian, memberlakukan pembagian *work from home* dan *work from office* terhadap para pekerja. "Sekitar tiga Minggu pembatasannya, itu minimal. Itu akan menurunkan angka penularan yang cukup besar," terang Riris.

Pilih PPKM

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memilih melakukan pengetatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ketimbang karantina wilayah atau *lockdown* untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di DIY.

Keputusan itu ditempuh sesuai digelar rapat koordinasi antara Gubernur DIY dengan perwakilan RS rujukan Covid-19, akademisi, serta bupati dan wali kota. Dalam rapat tersebut, Sultan meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera memperkuat dan membentuk satuan tugas

(satgas) Covid-19 di tiap RT/RW.

Satgas diharapkan dapat membantu upaya pengawas kegiatan-kegiatan yang biasa digelar masyarakat. Termasuk penegakan aturan dalam kebijakan PPKM mikro. "Perlu membatasi di antara mereka yang ada di setiap kelurahan agar Satgas yang belum terbentuk mohon bisa diselesaikan yang ada di kelurahan," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (21/6).

Lebih jauh, Sri Sultan menuturkan, wacana *lockdown* atau karantina yang dulu sempat dilontarkan merupakan solusi terakhir jika pandemi tak kunjung dapat dikendalikan. Kebijakan tersebut, diakui Sultan, sulit untuk dilakukan. Pasalnya bakal membawa konsekuensi besar.

Pascakarantina wilayah diberlakukan, otomatis perekonomian masyarakat akan terganggu. Sehingga Pemda DIY harus menanggung segala kebutuhan warganya. Sultan mengaku tak sanggup jika harus menghidupi seluruh warga DIY.

"(Jika *lockdown*) orang

jualan enggak ada. Yang buka hanya apotek dan supermarket, yang lain tutup. Pemerintah harus ganti duit untuk masyarakat, untuk beli makan. Ya, kalau kita tidak kuat," terang Sultan. "Ya enggak, tidak ada kalimat *lockdown*. Saya tidak kuat meragati (membiayai) semua rakyat se-Yogya. Itu pilihan terakhir," tambah Raja Keraton Yogyakarta ini.

Terkait dengan aktivitas pariwisata, segala keputusan untuk menutup tempat wisata bakal diserahkan kepada masing-masing kepala daerah.

Pasalnya, bupati dan wali kota dianggap paling tahu tentang kondisi nyata di lapangan. Kepala daerah misalnya dapat meniru langkah Bupati Bantul untuk menutup sejumlah destinasi wisata pada akhir pekan karena tingkat kunjungan selalu membeludak.

"Terseerah bupati wali kota, saya tidak ada kebijakan seperti itu (penutupan tempat wisata). Kabupaten kota bisa melihat kondisi riilnya. Pengalaman seperti (penutupan) Parangtritis kan sudah jelas," tandas Sultan. (tro)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005